BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangKerjaPraktek

Pembangunan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancer apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbesar di dapat dari sector perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat dirasakan. Walaupun tidak mendapat *kontraprestasi* secara langsung namun tanpa disadari pajak yang dipungut oleh pemerintah telah memberikan keuntungan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan bagi masyarakat umum. Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System* yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci keberhasilan dari Self Assesment system. Kepatuhan wajib pajak tersebut diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi lebih optimal.

Salah satu kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dengan menunjukan kepatuhannya untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Dimana SPT merupakan surat yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana fungsi dari SPT yaitu digunakan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Salah satu jenis SPT yaitu SPT PPh Badan. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan pada prinsipnya ada dua yaitu SPT masa dan SPT Tahunan. Dimana SPT masa (PPh Pasal 25) hanyalah berbentuk SSP yang dipersamakan sebagai SPT. Yang wajib mengisi dan meyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan bentuk umum (formulir 1771) adalah WP Badan yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, koperasi, yayasan, dll.

Pada kenyataanya SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh wajib pajak bisa dalam bentuk nihil, kurang bayar maupun lebih bayar. SPT PPh Badan nihil yaitu merupakan SPT yang dilaporkan saat PPh terutang sama dengan kredit pajak. Sedangkan SPT Lebih bayar bisa terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan (restitusi) setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Begitu pun dengan SPT Kurang bayar yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak, maka wajib pajak tersebut dikatakan melaporkan SPT Kurang Bayar dan atas kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima)

bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak akan dikembangkan menuju kearah pelaporan secara elektronik yang dikenal dengan e-SPT. Data untuk e-SPT ditransfer kedalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), e-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data dan mencetak SPT Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) yang digunakan saat ini oleh DJP merupakan system informasi yang diaplikasikan dalam keseluruhan administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak. Penatausahaan, pengawasan, serta aplikasi administrasi lainnya terintegrasi dalam satu system, sehingga proses pengolahan data maupun pertukaran informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan manajemen kasus (Case Manajement), dan secara berkesinambungan terus disempurnakan. Tujuan utama dibentuknya system informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajibpajak.

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP) dalam mengaplikasikan administrasi perpajakannya yaitu Kantor PelayananPajak Pratama Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan salah satu unit instansi vertical Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Seksi Pengolahan Data dan Informasi merupakan salah satu seksi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan mengenai proses perekaman SPT PPh Badan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan judul**“Tinjauan terhadap Pengujian Teknis Perhitungan dan Pelaporan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP pada KPP Pratama Bandung Karees Seksi Pengolahan data dan Informasi.”**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengujian teknis perhitungan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP.
2. Untuk mengetahui pengujian teknis pelaporan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian ini baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun literatur, diharapkan akan memberi manfaat bagi penulis, bagi instansi serta bagi pihak lain.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam mengetahui pengujian teknis perhitungan dan pelaporan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP. Selain itu, dapat menambah pengalaman bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh dibangku kuliah.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi manajemen perusahaan sehubungan dengan pengujian teknis perhitungan dan pelaporan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP yang dapat digunakan dalam mengevaluasi penyempurnaan kegiatan dalam proses tersebut.

3. Bagi pihak lainnya

Dapat menjadi tambahan referensi dan informasi mengenai prosedur perekaman SPT PPh Badan serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis menggunakan metode *Block Release*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dalam suatu periode selama satu periode tertentu. Penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini tentunya memerlukan pengumpulan data dan penulis menyusun laporan kerja praktek dimulai dari tanggal 26 juli 2010 sampai dengan 27 agustus 2010. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data. Data ini dapat diperoleh dengan cara:

1. Pengamatan (*Observaion*)

Pengamatan (*Observaion)* adalah teknik penelitian dan pengumpulan data dengan cara mengamati objek secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

2. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara (Interview) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan (Tanya jawab) dengan yang diwawancara, Penulis memperoleh data dengan mewawancarai pegawai bagian seksi pengolahan data dan informasi di Kantor PelayananPajak.

b) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, catatan kuliah dan literatur lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Adapun lokasi untuk melakukan kerja praktek ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No.372 (Kiaracondong) Bandung 40275. Telepon (022) 7333180 dan Faksimile (022)7337015.

Kerja praktek ini dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 26 juli sampai dengan 27 Agustus 2010. Dimana hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1
JadwalPelaksanaanKerjaPraktek

No	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan / mingguke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**TahapPersiapan**																								
	1. MemperolehsuratizinKerjaPraktekdarikampus																								
	2. Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek																								
	3. Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan																								
	4. MenentukantempatKerjaPraktek																								
2	**Tahap Pelaksanaan**																								
	1. Meminta surat pengantar kepada perusahaan																								
	2. Melaksanakan Kerja Paktek di perusahaan																								
	3. Pengambilandanpengumpulan data dariperusahaan																								
	4. MenyiapkanlaporanKerjaPraktek																								
	5. Bimbingan di perusahaan																								
3	**TahapPelaporan**																								
	1. PenyusunanlaporanKerjaPraktek																								
	2. Bimbingan di kampus																								
	3. PenyempurnaanlaporanKerjaPraktek																								
	4. PenggandaanlaporanKerjaPraktek																								